

BAB I

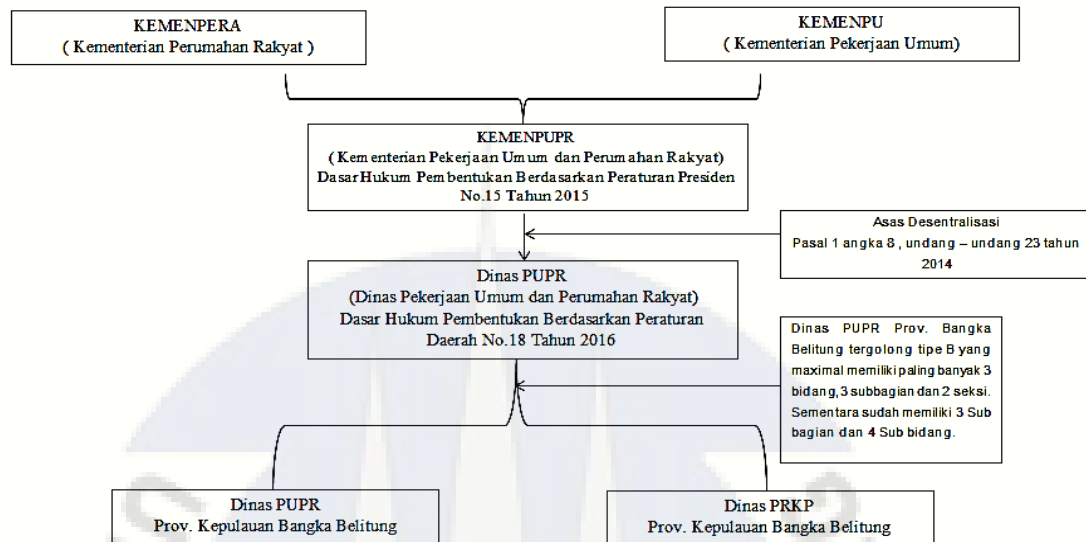
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pada birokrasi tataran pemerintahan daerah merupakan suatu hal wajar dilakukan guna mengevaluasi dan memperbaiki kinerja instansi di birokrasi yang bersangkutan. Salah satu hal yang terjadi guna memperbaiki kurang optimalnya kinerja organisasi antara lain adalah melalui restrukturisasi organisasi, Agustamar (2014). Restrukturisasi organisasi dapat dimaknai sebagai *political will*, perubahan stratus hukum, organisasi dan keuangan yang positif dari pemerintah untuk menciptakan sebuah birokrasi pemerintahan yang sehat dan memberikan fokus kontribusi salah satu nya melalui pembiayaan pembangunan (KemenkumHam RI,2016).

Salah satu organisasi yang terbentuk melalui restrukturisasi organisasi adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) terbentuk dari restrukturisasi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan tersebut atas dasar hukum peraturan daerah No.18 Tahun 2016 dan Pergub Kepulauan Bangka Belitung No.58 Tahun 2016 melalui asas desentralisasi. Aturan tersebut turunan dari Perpres RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang KemenPUPR yang di bentuk melalui penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan tahun 2015 tergambar pada Gambar I.1.

Gambar I.1 Alur Restrukturisasi Organisasi Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2019.

Berdasarkan Asas desentralisasi yang diatur pada ketentuan Pasal 1 (8), UU 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang berbunyi mengenai pembagian urusan pemerintahan melalui asas otonom. Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui konsep asas otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan wilayahnya masing – masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam mengatur atas jalannya pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut salah satunya di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahun 2016 Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung mengalami restrukturisasi organisasi pemerintahan dalam urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan dan permukiman dan kawasan permukiman, sehingga terbentuklah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) prov. Kepulauan Bangka Belitung yang beroperasi terhitung tanggal 1 Januari 2017.

Terbentuknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) didasarkan pada hasil sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum restrukturisasi. Restruktusisasi perlu dilakukan dikarenakan Dinas PUPR merupakan dinas golongan dengan tipe B. Golongan tipe B terdiri dari beberapa bagian antara lain 1 sekretariat dengan 3 bidang, sekretariat yang teridiri terdiri dari 3 subdinas bagian dan maksimal perseksi 2 per masing – masing bidang. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk menambah bidang baru yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, oleh karena itu dalam hal ini salah satu bidang di Dinas PUPR sebelumnya yaitu bidang Cipta Karya yang memiliki tupoksi dan sasaran kerja yang hampir sama dengan bidang yang akan dibentuk dipisahkan melalui penyerahan tupoksi dan tanggung jawab secara *decentralizing* guna menangani bidang perumahan rakyat dan permukiman, maka dibentuklah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Awal terbentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) pasca restrukturisasi organisasi dari Dinas PUPR, terdapat berbagai hal perubahan yang mempengaruhi seluruh elemen di lingkungan organisasi.

Perubahan tersebut melingkupi perubahan bentuk struktur organisasi, bidang dan tupoksi, jumlah sumber daya manusia serta sasaran capaian hasil kinerja. Perubahan bentuk struktur organisasi, bidang dan tupoksi pasca restrukturisasi organisasi Dinas PRKP Prov. Kep Bangka Belitung di tunjukan pada tabel I.1 sebagai berikut:

Tabel I.1 Perubahan Bentuk Struktur Organisasi, Bidang dan Tupoksi Pasca Restrukturisasi Organisasi Dinas PRKP Prov. Kep Bangka Belitung

	Dinas PUPR	Dinas PRKP
Bentuk Struktur	<i>Downsizing</i>	<i>Decentralizing</i>
Bidang	3 Subbidang Dinas (Keuangan, Bag. Umum dan Kepegawaian, Perlengkapan) 4 Seksi / Subbidang	2 Subbidang Dinas (Perumahan Rakyat, Cipta Karya) 2 Seksi / Subbidang
Tugas	Memiliki tugas pokok membantu gubernur dibidang pekerjaan umum.	Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Konsep kota mandiri seperti : Air Anyir. 2. Penguatan Kapasitas infrastruktur dalam rangka mendukung Pembangunan Ekonomi dan Investasi di masyarakat 3. Peningkatan Daerah Terisolir, Pulau terpencil serta Daerah Kumuh. 4. Peningkatan Lingkungan Perumahan yang sehat dan Produktif serta Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang Aptel. 2. Menyiapkan bahan penyelenggara administrasi dan keuangan perangkat daerah dibidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta membantu gubernur dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman lainnya.

Sumber : *Babelprov.go.id* (2019)

Perubahan yang ditunjukkan oleh Tabel I.1 pasca restrukturisasi organisasi juga menyebabkan perubahan jumlah sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan dari *Downsizing* atau terjadinya perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa bidang atau subdinas tertentu di Dinas PUPR,

kemudian dilakukan penyerahan tupoksi sebelumnya kepada Dinas PRKP atau dikenal sebagai *Decentralizing*.

Perubahan jumlah sumber daya manusia akibat dari perubahan bentuk struktur organisasi, bidang, serta tupoksi pasca restrukturisasi organisasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di dukung oleh pernyataan informasi dari kepala subbag umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang semulanya menjabat sebagai kepala subbag dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut informasi dari bapak Henry Rizal S.E.,M.M (2019) selaku kasubbag umum Dinas PRKP menjelaskan perubahan dari segi Jumlah pegawai (SDM) sebagai berikut:

“Jumlah pegawai yang ada guna menunjang kinerja organisasi berjumlah kurang lebih 350 orang pegawai terdiri dari 230 orang pegawai PNS dan 120 orang pegawai honorer saat sebelum terjadinya restrukturisasi di Dinas PUPR, kemudian menjadi 43 orang pegawai pasca restrukturisasi menjadi Dinas PRKP melalui proses mutasi seluruh sdm bidang cipta karya, bidang umum dan instansi lainnya yang memiliki kesinambungan dengan tupoksi baru di Dinas PRKP”.

Berdasarkan informasi tersebut pasca restrukturisasi jumlah sumber daya manusia mengalami perubahan dengan cara mutasi yang berasal dari instansi lainnya dan juga dari Dinas PUPR. Deskripsi perubahan jumlah mutasi sumber daya manusia pada awal terbentuknya Dinas PRKP pasca restrukturisasi organisasi dari Dinas PUPR serta Instansi Dinas lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung tanggal 1 Januari 2017 hingga 2019 di tujukan oleh tabel I.2 sebagai berikut:

Tabel I.2 Jumlah Mutasi Sumber Daya Manusia Pasca Restrukturisasi Organisasi Dinas PRKP tahun 2017-2019

No	Asal Mutasi	Tanggal Mutasi	Jumlah Mutasi
1	Kabid Cipta Karya Dinas PUPR	01/01/2017	1 Orang
2	Kasubbag Umum Dinas PUPR	01/01/2017	1 Orang
3	Kasi Penyediaan Air Minum Dinas PUPR	01/01/2017	1 Orang
4	Kasi PPBPLP Dinas PUPR+	01/01/2017	1 Orang
5	Staf Cipta Karya Dinas PUPR	01/01/2017	28 Orang
6	Staf Subbag Umum Dinas PUPR	01/01/2017	2 Orang
Total Mutasi dari Dinas PUPR			34 Orang
1	Kepala Dinas Kominfo Prov. Babel	01/01/2017	1 Orang
2	Badan Koordinasi Penyuluhan	01/01/2017	2 Orang
3	Kasi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Babel	01/01/2017	1 Orang
4	BPD Prov. Babel	01/01/2017	1 Orang
5	BPK SDM Prov. Babel	01/01/2017	1 Orang
6	Sekretaris Dewan	01/01/2017	1 Orang
7	Kepala ULPB Prov. Babel	01/01/2017	1 Orang
8	Staf ULPB Prov. Babel	01/01/2017	1 Orang
Total Mutasi dari Instansi lain			9 orang
Total Mutasi SDM ke Dinas PRKP			43 Orang
1	Honorer (Fluktuatif dari tahun 2017 – 2018)		14 Orang
Total Mutasi ke Dinas PRKP			57 Orang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2019).

Tabel I.2 mendeskripsikan jumlah mutasi sumber daya manusia pasca restrukturisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta instansi lainnya. Sumber daya manusia yang dipindahkan atau mengalami mutasi adalah sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam hal ini ditangani oleh bidang cipta karya, subbag umum dan perencanaan yang dibawah oleh sekretariat guna membantu dan melaksanakan tugas dan sasaran capaian kinerja di Dinas PRKP. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang mengatakan bahwa kinerja merupakan pencapaian hasil kerja berdasarkan persyaratan pekerjaan (*Job requirment*), Bangun (2012:231).

Hasil deskripsi dari Tabel I.1 dan Tabel I.2 peneliti menyimpulkan bahwa perubahan tersebut juga menyebabkan perubahan pada hasil kerja yang disebabkan oleh perbedaan sasaran capaian hasil kinerja sebelum dan pasca restrukturisasi organisasi Dinas PRKP. Sasaran capaian hasil kinerja pasca restrukturisasi organisasi Dinas PRKP termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan bidang cipta karya dan perumahan permukiman rakyat tahun 2016-2018 yang terhitung sebelum restrukturisasi dari Dinas PUPR pada tahun 2016 dan pasca restrukturisasi tahun 2017-2018 pada Tabel I.3 sebagai berikut.

Tabel I.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Sebelum Restrukturisasi Organisasi dari Dinas PUPR Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator	Target	%	Capaian	Tahun
Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum, rumah bersanitasi, dan penurunan kawasan kumuh	Kebutuhan air minum, rumah sanitasi, penurunan kawasan kumuh.	80%	37,61%	42,39%	2016
Peningkatan perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali	Ketersediaan Luasan RTH Publik	25%	10,16%	14,84%	
Total rata – rata capaian khusus Bidang Cipta Karya				24,6%	

Sumber: Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017

Tabel I.3 merupakan pencapaian hasil kinerja bidang cipta karya sebelum restrukturisasi organisasi dari Dinas PUPR dengan rata – rata perhitungan capaian diluar pembagian bidang lainnya sebesar 24,6% . Terlihat bahwa capaian target yang ditetapkan masih jauh dari hasil capaian yang

diperoleh. Hal ini dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran, kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang jumlahnya banyak dan terlibat secara efektif dan efisien dalam pengelolaan kinerja, sebelum restrukturisasi organisasi. Adapun kondisi pencapaian hasil kinerja pasca restrukturisasi terbentuknya Dinas PRKP dari Dinas PUPR dapat dilihat pada Tabel I.4 sebagai berikut.

Tabel I.4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Dinas PRKP Pasca Restrukturisasi Organisasi dari Dinas PUPR Tahun 2017-2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun
Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum, rumah bersanitasi, dan penurunan kawasan kumuh	Terpenuhnya kebutuhan air minum	80%	975.328 Jiwa	71,42%	35,07%	2017
	Rumah tinggal bersanitasi	80%	792 Rumah	61%	60,78%	
	Kawasan Kumuh	10%	0	0%	17%	
Peningkatan Sarana – Prasarana Kawasan Permukiman	PSU yang terbangun pada kawasan permukiman	5%	1150 M	23%	0%	
Peningkatan perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali	Ketersediaan Luasan RTH Publik	25%	0%	0%	10,16%	2017
Total rata – rata capaian				31,08%	24,6%	
Peningkatan Ketersediaan hunian layak bagi masyarakat	Cakupan rumah layak huni	93,93%	93,93%	100%	-	2018
Peningkatan kualitas permukiman di Kawasan Strategis (KSP)	Rasio Permukiman layak huni di KSP	2,96%	2,96%	100%	-	

Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya lingkungan permukiman kumuh	0,0069%	0,0065 %	95%	-	
Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih	Persentase Penduduk Berakses Air bersih	78,60%	78,60%	100%	-	
Peningkatan penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi	Rasion penanganan akibat bencana kawasan provinsi	48,70%	48,70%	100%	-	
Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan aparatur daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	-	

Sumber: Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2018

Berdasarkan hasil pengukuran capaian hasil kinerja dari Tabel I.4 disimpulkan bahwa kinerja Dinas PRKP tergolong cukup baik pasca restrukturisasi organisasi dengan total capaian kinerja sejumlah 31,08% melampaui capaian tahun sebelumnya yakni 24,6% (sebelum restrukturisasi dari Dinas PUPR), meskipun pada indikator kinerja ke-3 capaian kinerja hanya mencapai 0% dari target sebanyak 25%, hal ini dikarenakan tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P tahun 2017 pasca restrukturisasi organisasi yang mana jumlah luasan yang masih sama pada tahun 2016 dalam RTH (Ruang Terbuka Hijau) Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus peningkatan capaian kinerja dalam bidang pembangunan ruang terbuka hijau ditahun-tahun selanjutnya. Tahun 2018 capaian kinerja Dinas PRKP tergolong baik dan

sedikit meningkat pasca satu tahun restrukturisasi organisasi dari dinas PUPR melalui program-program rencana strategis yang baru dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat di kategorikan sebagai pencapaian yang terpisah dari tahun sebelumnya dan masih banyak membutuhkan capaian kinerja yang didukung oleh sumber daya lainnya, salah satunya melalui peran pemimpin dalam memimpin Dinas PRKP yang baru terbentuk menjadi lebih terfokus dalam pengelolaan kinerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa peran pemimpin salah satunya adalah mampu mempengaruhi bawahan atau rekan kerja lainnya guna menentukan tingkat kemajuan kinerja dan organisasi, Edy Sutrisno (2010:34).

Hal tersebut didukung melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait peran pemimpin yang sebelumnya membawahi bidang Dinas PUPR dan Dinas PRKP pasca restrukturisasi yang dilaksanakan bersama Kepala sub bagian umum yaitu bapak Henri rizal, SE.,MM pada hari Rabu 13 Februari 2019 pukul 08.45-09.53 WIB, bertempat di Ruang Subbagian Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bersama Kepala bidang cipta karya dan permukiman yaitu Bapak Irawan D. Yuliantoro, ST.,MT, pada hari Rabu 13 Februari 2019 pukul 13.45-14.33 WIB bertempat di Ruang Subbagian Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan wawancara narasumber pertama menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam lingkup peran pemimpin dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi pada saat menjadi pemimpin pada Dinas PUPR dan Dinas PRKP. Pada saat narasumber menjabat sebagai Kasubbag Perlengkapan di Dinas PUPR memiliki peran kendali atas pengendalian aset internal (perlengkapan kantor) dan eksternal (perlengkapan proyek). Pasca restrukturisasi narasumber menjabat sebagai Kasubbag Umum di Dinas PRKP yang memiliki peran untuk membantu sekretariat dalam usaha ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian dan keuangan.

Perbedaan hal tersebut mempengaruhi kinerja narasumber dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan jabatan yang dimiliki karena adanya perbedaan pengalaman, tupoksi kerja serta jumlah sumber daya manusia yang berbeda yang terlibat berbeda sehingga mengharuskan narasumber untuk menerapkan penyesuaian budaya kerja dan menciptakan iklim organisasi yang baru dan nyaman guna pada saat narasumber menjadi pemimpin Dinas PRKP.

Berbeda dengan narasumber pertama, hasil wawancara bersama narasumber kedua didasarkan pada pengalaman narasumber dalam memimpin, menangani dan membawahi berbagai kasi di dinas PUPR hingga ditempatkan kembali di Dinas PRKP, sebagai kepala bidang cipta karya dan permukiman pada tahun 2018.

Peranan narasumber dalam memimpin, menangani dan membawahi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada bidang cipta karya

yang sebelumnya merupakan sub bidang di Dinas PUPR dan menjadi sub bidang di Dinas PRKP menyebabkan terletak sedikit perbedaan dalam hal wewenang. Peran narasumber di Dinas PUPR, sebagai kasi pengaturan dan pemberdayaan menjalankan tugas dan wewenang lebih terfokus dan terlibat turun langsung pada peningkatan pemberdayaan dengan skope tupoksi yang lebih kecil kepada masyarakat yangmana seluruh bawahan terlibat dan dapat dipantau serta dievaluasi secara langsung, sementara itu pasca restrukturisasi peran narasumber lebih kepada menjalankan peran pemimpin pada umumnya yakni hal – hal administratif, mengarahkan, mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan sesuai tupoksinya yangmana evaluasi kinerja jarang secara langsung dilakukan di Dinas PRKP.

Suatu Kinerja dapat dikatakan baik apabila hasil evaluasi kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sebelumnya didukung oleh lingkungan kerja (iklim organisasi) yang baik dan budaya organisasi yang kuat sebagai berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau pegawai, Wirawan (2009:9)

Perbedaan dari segi Iklim organisasi yang terjadi di Dinas PRKP pasca restrukturisasi dari Dinas PUPR diperoleh melalui hasil pra-survei lapangan di kedua dinas bersangkutan yang digambarkan pada Tabel I.5 sebagai berikut.

Tabel I.5 Gambaran Perubahan Iklim Organisasi Pasca Restrukturisasi Dinas PRKP dari Dinas PUPR

No	Iklim Organisasi	Dinas PUPR	Dinas PRKP
1	Jumlah Ruangan Kerja	19 Ruangan Kerja + 2 Gudang Besar	13 Ruangan Kerja
2	Jumlah SDM dalam satuan kerja	350 Orang	57 Orang
3	Orientasi	Pekerjaan umum bidang tata kota, Peningkatan pembangunan daerah dan kota mandiri	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Jumlah Bidang	3 Sub dinas, 3 sub bagian, 4 Seksi/subdinas	2 Bidang, 4 Kasi, 2 Subbagian

Sumber: Survei Lapangan Dinas PUPR dan Dinas PRKP (2019)

Tabel I.5 menunjukkan perbedaan lingkungan dan suasana kerja Dinas PRKP Pasca Restrukturisasi Organisasi dari Dinas PUPR. Perbedaan tersebut akan menciptakan suasana dan sikap yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai di organisasi. Mendukung Tabel I.5 dilakukan survei pendahuluan mengenai iklim organisasi pasca restrukturisasi organisasi pada Tabel I.6 sebagai berikut.

Tabel I.6 Hasil Pra Survey Iklim Organisasi di Dinas PRKP

No	Indikator Pengukuran Iklim Organisasi	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu/Jarang	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
1	Ruang Kerja Saya Bebas dari Kebisingan dan mempengaruhi kinerja	2	3	6	8	0	19
	Persentase	10,52%	15,78%	31,57%	42,10%	0%	100%
2	Teknologi/Sarana Prasarana yang terpenuhi dan sudah sangat menunjang kinerja	0	8	8	3	0	
	Persentase	0%	42,10%	42,10%	15,78%	0%	100%
3	Jumlah SDM dan Bidang yang sedikit meningkatkan kinerja	1	7	8	2	1	19
	Persentase	5,26%	36,84%	42,10%	10,52%	5,26%	100%

Sumber: Pra Survei Iklim Organisasi Dinas PRKP (2019)

Tabel I.6 disimpulkan bahwa iklim organisasi di Dinas PRKP masih belum sepenuhnya kondusif. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 42,10% tidak setuju bahwa ruang kerja bebas dari kebisingan dan mempengaruhi kinerja ditambah teknologi/sarana prasarana yang dianggap belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun sebagian lainnya merasa cukup terpenuhi artinya hal ini belum adanya pemerataan suasana atau iklim yang dirasakan oleh pegawai Dinas PRKP yangmana sebanyak 42,10% beranggapan bahwa kinerja tidak hanya ditunjang oleh teknologi yang terpenuhi namun juga keterlibatan peran serta dan sikap SDM di Dinas PRKP diduga mampu meningkatkan kinerja. Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa iklim organisasi merupakan salah satu faktor pokok yang ikut menentukan dan mempengaruhi sikap dan kinerja karyawan atau pegawai. Iklim organisasi yang dirasakan dan dilakukan setiap hari secara berulang-ulang akan menciptakan budaya kerja yang mempengaruhi output kinerja pegawai, Liliweri (2014:304)

Pasca restrukturisasi perbedaan gambaran Budaya Kerja dapat dilihat dari segi pedoman penunjang budaya kerja antara Dinas PUPR dan Dinas PRKP pasca restrukturisasi yang diperoleh melalui hasil pra-sruvei lapangan di kedua dinas bersangkutan yang digambarkan pada Tabel I.7 sebagai berikut.

Tabel I.7 Pedoman Penunjang Gambaran Budaya Kerja Pasca Restrukturisasi Dinas PRKP dari Dinas PUPR

No	Pedoman	Dinas PUPR	Dinas PRKP
1	Papan Struktur Organisasi Keseluruhan	Terpasang/Tersedia	Terpasang/Tersedia
2	Papan Nama Instansi	Terpasang/Tersedia	Terpasang/Tersedia
3	Papan Visi Misi Organisasi	Terpasang/Tersedia	Belum Terpasang
4	Papan Visi Misi Persebidang	Terpasang/Tersedia	Belum Terpasang
5	Aturan Presensi Pegawai Prov. Babel	Terpasang/Tersedia	Terpasang/Tersedia
6	Papan Budaya Kebersihan Kantor	Terpasang/Tersedia dalam bentuk Akrilik	Tersedia dalam bentuk Print Out
7	Struktur Organisasi perbidang/ruangan	Terpasang/Tersedia dalam bentuk Print Out	Belum Terpasang/Belum Tersedia
8	Daftar Nama Pegawai Bidang/Ruangan	Terpasang/Tersedia	Belum Terpasang
9	Daftar Klasifikasi Pegawai Bidang/Ruangan	Terpasang/Tersedia	Belum Terpasang
10	Papan Pengumuman	Terpasang/Tersedia	Terpasang/Tersedia
11	Aturan Budaya Penggunaan Sarana Kantor	Belum Terpasang/Tersedia	Terpasang/Tersedia
12	Papan/Banner Budaya 5 S	Belum Terpasang/Tersedia	Belum Terpasang/Belum Tersedia
13	Draft Surat Masuk/Keluar	Tersedia	Tersedia
14	Absensi	Merchant Absensi	Merchant & Manual
15	Pedoman Kerja	Tersedia	Tersedia

Sumber: Survei Lapangan Dinas PUPR dan Dinas PRKP (2019)

Tabel I.7 Menunjukkan kondisi perbedaan sarana prasarana penunjang atau sebagai pedoman budaya kerja organisasi, khususnya di Dinas PRKP pasca restrukturisasi organisasi dari Dinas PUPR. Mendukung Tabel I.7 tersebut dilakukan survei pendahuluan tentang budaya kerja pasca restrukturisasi organisasi di Dinas PRKP oleh Tabel I.8 sebagai berikut.

Tabel I.8 Hasil Pra Survey Budaya Kerja di Dinas PRKP

No	Indikator Pengukuran Budaya Kerja	Sangat Setuju	Setuju	Ragu /Jarang	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
1	Peraturan di tempat kerja sudah diterapkan sebagaimana mestinya	0	6	8	4	1	19
	Persentase	0%	31,57%	42,10%	21,05%	5,26%	100%
2	Nilai – Nilai Pedoman kerja selalu menjadi landasan dalam mencapai kinerja	1	7	8	2	1	19
	Persentase	5,26%	36,84%	42,10%	10,52%	5,26%	100%
3	Budaya Kerja merupakan cerminan dari kinerja organisasi	2	8	5	4	0	19
	Persentase	10,52%	42,10%	26,31%	21,05%	0%	100%

Sumber: Pra Survei Budaya Kerja Dinas PRKP (2019)

Tabel I.8 dapat disimpulkan bahwa rata-rata budaya kerja pegawai di Dinas PRKP masih jarang atau ragu – ragu dalam menerapkan peraturan dan mengaplikasikan nilai – nilai pedoman kerja ditempat kerja yang harus dipatuhi atau diikuti sebagaimana mestinya sebagai landasan dalam pencapaian kinerja yang dilakukan. Akan tetapi sebanyak 42,10% setuju bahwa budaya kerja merupakan cerminan kinerja organisasi yang dibentuk melalui kinerja pegawai dan budaya kerja yang baik ataupun sebaliknya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti uraikan di Dinas PRKP pasca restrukturisasi organisasi yang belum maksimal, alasan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran pemimpin, iklim organisasi, dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai

Dinas PRKP dengan judul penelitian “ **Analisis Peran Pemimpin, Iklim Organisasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pasca Restrukturisasi Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Prov. Kepulauan Bangka Belitung**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja dan kinerja pegawai pasca restrukturisasi organisasi di Dinas PRKP Prov.Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Apakah peran pemimpin berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung ?
3. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov.Kepulauan Bangka Belitung ?
4. Apakah budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov.Kepulauan Bangka Belitung ?
5. Apakah peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung ?
6. Seberapa besar pengaruh peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini peneliti menentukan batasan masalah dan tujuan agar masalah yang di teliti terfokus pada sasaran penelitian meliputi:

1. Pembahasan penelitian ini dibatasi hanya menganalisis peran pemimpin, iklim organisasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan tidak membahas perbandingan sebelum restrukturisasi di Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
2. Responden dan lokasi penelitian ini adalah pegawai Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk :

1. Mendeskripsikan peran pemimpin, iklim organisasi , budaya kerja dan kinerja pegawai pasca restrukturisasi organisasi di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mengetahui pengaruh tentang peran pemimpin terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mengetahui pengaruh tentang iklim organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
4. Mengetahui pengaruh tentang budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
5. Mengetahui pengaruh peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja dan kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

6. Mengetahui seberapa besar pengaruh peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja dan kinerja pegawai di Dinas PRKP Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu memperluas wawasan yang dapat menambah Ilmu Pengetahuan Manajemen secara umum dan hasil analisa penerapan tentang peran pemimpin, iklim organisasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai secara khusus.
- b. Manfaat selanjutnya yaitu diharapkan memberikan pengetahuan baru secara mendalam tentang analisis peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Instansi pemerintahan serta dapat sebagai referensi dibidang manajemen sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan bagi instansi terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Prov.Kepulauan Bangka Belitung agar dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi dinas terkait mengenai analisis peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja terhadap kinerja pegawai.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai acuan evaluasi guna menentukan penerapan kebijakan oleh instansi dinas terkait guna meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang mendasari dilakukannya penelitian ini tentang permasalahan serta fenomena yang melatar belakangi judul penelitian mengenai “ Analisis peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja terhadap kinerja pegawai pasca restrukturisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang diurutkan seperti yang tertulis pada sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat mengenai dasar teori penelitian yang berisi teori – teori berkaitan tentang peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja, kinerja pegawai dan restukturisasi organisasi , penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang berkaitan dengan restrukturisasi

organisasi, analisis peran pemimpin, iklim organisasi, budaya kerja, kinerja pegawai.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang pendekatan – pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, tempat dan waktu penelitian, berisi definisi operasional dan pengukuran variabel, penjelasan populasi dan sampel, penjelasan sumber dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan penelitian yang berisi sejarah dan deskripsi dinas yang diteliti, hasil penelitian karakteristik responden, hasil pengolahan dan pembahasan analisis data penelitian di Dinas Perumahan PRKP Prov.Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat hasil akhir dengan simpulan melalui serangkaian pembahasan pada penelitian, memaparkan saran dari penulis kepada berbagai pihak - pihak terkait dan terlibat dalam penelitian.